

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disertasi ini menarik beberapa kesimpulan, untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam fokus penelitian berdasarkan data atau temuan peneliti, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Bulukumba mengalami pergolakan dari Islamisme menjadi pos-Islamisme. Gejala pos-Islamisme terlihat jelas dengan mencermati peristiwa sejarah gerakan Islam di Bulukumba yang mengalami proses kesinambungan (*continuity*), dan perubahan (*change*). Usaha memperjuangkan ide Islamisme terus berkesinambungan dari masa lalu hingga masa kini. Namun, seiring berjalannya waktu juga mengalami bentuk perubahan baik itu dari tokoh yang terlibat, strategi gerakan, hingga yang disebut menjadi pos-Islamisme.

Masa awal upaya Islamisasi di Bulukumba yang dimotori oleh Datuk ri Tiro pada sekitar tahun 1013 H/1604 M. Membuktikan bahwa masyarakat lokal dengan kepercayaan yang melekat padanya, terlihat inferior terhadap agama baru (Islam). Hal ini, dibuktikan dengan diterimanya sebagian ajaran Islam dalam masyarakat Bulukumba, serta menjadi bukti bahwa mereka bernegosiasi dengan ajaran dari luar.

Integrasi budaya lokal dan Islam semakin terlihat jelas dengan diterimanya Islam ke dalam *Pangngadereng* (sistem kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar) yang diterapkan oleh pihak kerajaan. Tidak banyak informasi tentang ulama

pelanjut pasca Datuk ri Tiro, kecuali Guru Langkasa yang dianggap sebagai murid dari Datuk ri Tiro dalam cerita masyarakat. Kelanjutan gerakan Islam, ditandai dengan kehadiran lembaga tarekat sekitar abad ke-19, seperti Khalwatiyah Samman, dan Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassary. Bahkan, di masa itu pula telah terjadi upaya pembaruan Islam oleh Panre Abeng, melalui gerakan purifikasi menyerang praktik animisme di Bulukumba.

Pada masa kolonial, gerakan Islam berhadapan dengan pihak penjajah. Tetapi eksistensi Islam tetap berlanjut dengan munculnya organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang berbasis dakwah, dan pendidikan Islam. Di Bulukumba, seorang ulama bernama S. Majidi berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam, yang berafiliasi ke Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan saat itu. Gerakan Politik Islam di masa kolonial, sangat dibutuhkan dalam melakukan perlawanan terhadap para penjajah Belanda, karena dipandang sebagai “pemerintah kafir” yang harus dimusuhi dan diusir.

Setelah itu, gerakan Islamisasi berlanjut pasca kemerdekaan yang dilakukan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), di bawah komando Kahar Muzakkar. Di masa Orde Lama hingga Orde Baru, selain adanya aktivitas Islam politik, namun perkembangan Islam tetap terlihat dengan berdirinya beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah muallimin Muhammadiyah, yayasan pendidikan Islam Maarif, Pesantren Babul Khaer, dan Universitas Nahdlatul Ulama di Bulukumba.

Saat masa reformasi, gerakan Islamisme kembali terjadi melalui formalisasi syariat Islam yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta dukungan

kelompok Islamis di Bulukumba, namun kenyataannya hanya berlangsung temporer. Yang menjadi perhatian penting, eksistensi kelompok Islamis di Bulukumba adalah tidak ada lembaga pendidikan Islam yang mereka dirikan sebagai bukti atau jejak perjuangannya. Karena, fokus gerakannya hanya pada wilayah gerakan sosial, dan politik. Barulah pada sekitar tahun 2002 Wahdah Islamiyah, muncul melalui gerakan dakwah serta mendirikan lembaga pendidikan.

Perubahan ke arah pos-Islamisme terlihat, dengan hadirnya kontra wacana dari sebagian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), atas formalisasi syariat Islam, karena melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), diskriminasi pada kelompok minoritas, dan masyarakat adat *Ammatoa* Kajang. Namun, setelah pergantian rezim Bupati Bulukumba A. Patabai Pabokori (1995-2005), Perda Syariat Islam menjadi mandek dari segi implementasi, ditambah dengan godaan budaya populer sebagai arus modernisasi tidak bisa dibendung lagi, sehingga ruang publik di Bulukumba menjadi lebih terbuka dan tersedianya sarana atau fasilitas hiburan bagi masyarakat Bulukumba.

Kedua, Strategi pos-Islamisme juga ditunjukkan oleh organisasi Wahdah Islamiyah secara umum. Dengan merujuk pada perubahan gerakannya yang terlihat pragmatis terhadap kondisi politik di Indonesia. Walaupun dikenal sebagai organisasi Islam yang berhaluan Salafi yang cenderung konservatif, tetapi Wahdah Islamiyah menampilkan wajah yang inklusif atau terbuka menerima NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara. Menerima demokrasi, dan modernitas serta menegosiasikannya dengan Islam. Sehingga Salafi ala Wahdah Islamiyah memiliki perbedaan dengan Salafi mainstream lainnya, dan bahkan

Wahdah Islamiyah juga seringkali mendapat kritik dari sesama kalangan Salafi di Indonesia. Namun, bukan berarti perubahan ke pos-Islamisme telah mengubah secara totalitas, tetapi narasi Islam puritan dan konservatif tetap berkesinambungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Salafi. Namun, kondisi tersebut menegaskan bahwa Wahdah Islamiyah di sisi lain dapat dikatakan mengalami pos-Islamisme tapi pada sisi yang lain juga masih Islamis.

Strategi Wahdah Islamiyah juga terlihat pada lembaga pendidikan Islam formal yang dibinanya. Di Bulukumba, SD IT Wahdah Islamiyah telah menjadi pilihan baru sebagai aspirasi pendidikan bagi kelas menengah Muslim. Kalangan ini, memilih sekolah dasar Islam terpadu (SD IT) Wahdah Islamiyah untuk menunjukkan ekspresi identitas mereka. Mahalnya biaya pendidikan, tidak lagi menjadi masalah utama yang lebih utama adalah pribadi muslim anak mereka lebih terjamin. Negosiasi yang saling bersimbiosis tersebut, terjadi karena faktor kepanikan moral terhadap perilaku anak-anak masa kini. Atas alasan tersebut, SD IT Wahdah Islamiyah dipandang mampu mewujudkan harapan-harapan tersebut.

Hadirnya SD IT Wahdah Islamiyah di Bulukumba, menjadi medan juang bagi Wahdah Islamiyah dalam pendidikan Islam. Ideologi pendidikannya, dipengaruhi oleh ideologi Salafi, yang menjadikan program “*Tarbiyatul Aulad*” atau pendidikan anak sebagai bagian penting di sekolah tersebut. Tujuan pendidikan sekolah ini, juga menjadi sarana menyebarkan pemahaman Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah berdasarkan pemahaman para *salafus saleh*. Walaupun tidak menggunakan sistem *fullday school*, dan *boarding school* seperti SIT pada umumnya, eksistensi SD IT Wahdah Islamiyah telah menjadi aspirasi

kelas menengah muslim di Bulukumba, karena tawaran kurikulum yang integratif, dan kualitas yang mereka tawarkan. Meskipun tidak bisa dinafikan, lembaga tersebut menjadi sarana penyebaran ideologi salafi secara perlahan terhadap siswa. Kecenderungan pos-Islamisme juga dapat dilihat dari modifikasi kurikulum pendidikan yang mereka pakai di SD IT Wahdah Islamiyah, karena sikap pragmatis mengintegrasikan kurikulum nasional, dan kurikulum SIT mereka yang disinyalir mengikuti pola pendidikan al Hasan al-Banna seorang tokoh *al-Ikhwan al-Muslimin*. Selain itu, sikap mereka juga sangat terbuka menerima Pancasila dan NKRI yang terimplementasi dalam kegiatan upacara bendera yang berlangsung setiap pekannya. Sehingga, strategi gerakan Islamisme dan pos-Islamisme berjalan secara simultan dalam lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Wahdah Islamiyah.

Pengaruh gerakan dakwah Wahdah Islamiyah juga terlihat jelas, setelah sayap organisasi mereka yang bernama Himpunan Pelajar Muslim Indonesia (HILMI) Bulukumba membangun kerjasama apik, dengan organisasi Rohani Islam (Rohis) di SMAN 1 Bulukumba, SMAN 8 Bulukumba, dan MAN 2 Bulukumba. Kelompok tersebut kini tekah mendominasi dakwah Islam di sekolah utamanya di wilayah perkotaan. Peluang itu dimanfaatkan oleh aktivis atau kader Wahdah Islamiyah Bulukumba untuk mengisi ruang dakwah Islam di sekolah tersebut. Koheren dengan narasi pos-Islamisme di kalangan anak muda juga ditunjukkan oleh pelajar kini menunjukkan identitas "*linguistic piety*" atau kesalehan berbahasa yang ditunjukkan oleh aktivis Rohis, seperti akrabnya sapaan "*ikhwan, akhwat, akhi, ukhti, antum, afwan*" di kalangan mereka. Tetapi mereka

juga tetap menikmati produk modernitas yang tidak bisa dijauhkan dari ponsel pintar (*smartphone*).

Ketiga, selain pos-Islamisme terjadi di lembaga pendidikan Islam di Bulukumba, juga ditemukan pos-Islamisme “kultural” sebagaimana teorisasi dari Ariel Heryanto yang sejalan dengan tren budaya populer. Budaya populer sangat erat kaitannya dengan perkembangan media sosial, hobi, dan minat di kalangan anak muda. Di Bulukumba muncul komunitas berbasis minat, dan hobi namun lebih tampak Islami, komunitas itu bernama Bikers Muslim Bulukumba. Anggota di komunitas ini mulai sadar akan pentingnya belajar agama, tetapi tidak membuat mereka meninggalkan kebiasaan mereka sebagai seorang Bikers. Mereka mengaktifkan kajian-kajian keagamaan lewat program keagamaan sebagai identitas Muslimnya. Mereka mengusung jargon “*Born to ride, ride to jannah*”, dan menjadi bentuk ekspresi “hijrah” mereka. Aktivitasnya telah menghidupkan gairah belajar sebagai bentuk pendidikan keislaman yang berlangsung dari mesjid ke mesjid.

Tren budaya populer juga dapat disaksikan pada saluran aktivitas belajar siswa di luar sekolah. Mereka tidak ingin ketinggalan dengan perkembangan media sosial, yang dapat dimanfaatkan sebagai media belajar Islam. Siswa kini belajar Islam, lewat ustadz *digital friendly*, melalui media *youtube*, *instagram*, *Whatapp*, dan lainnya. Gejala ini menampilkan ekspresi yang telah mengalami hibridasi, utamanya di kalangan remaja yang mengikuti tren budaya populer serta tampil Islami, namun tetap mengikuti budaya konsumtif sebagai anak muda yang akrab dengan ponsel pintar (*smartphone*). Bahkan, juga ada komunitas *Jomblo fi*

Sabilillah (Jofis), yang aktivitas belajar agama mereka memanfaatkan media *Whatsapp*. Komunitas ini berkomitmen untuk tidak pacaran sebelum menikah, dengan kekasih halal mereka. Inisiatif itu dipengaruhi oleh buku “Indonesia Tanpa Pacaran” yang ditulis oleh Laode Munafar. Selain, itu mereka juga tetap menimba pengetahuan agama Islam lewat kegiatan tabligh akbar, taklim dan tarbiyah di luar sekolah.

Secara teoritik temuan penulis tentang “pos-Islamisme dalam Pendidikan Islam”, berpijak pada teori pos-Islamisme Asef Bayat serta penafsiran beberapa pakar yang menggeluti kajian pos-Islamisme di Indonesia. Penulis, berusaha untuk membuka kajian baru tentang pos-Islamisme yang selama ini cenderung menggunakan tafsir tunggal, seperti kajian Islam Politik semata. Tetapi berkat Ariel Heryanto, secara “*out the box*” melihat sisi luar selain dari tafsir “Pos-Islamisme politik”, dengan menawarkan istilah “Pos-Islamisme kultural” yang terjadi pada konteks sosial, dan budaya populer masyarakat Indonesia. Dengan melihat konteks anak muda, dan kalangan kelas menengah Muslim yang hadir di ruang publik untuk menegosiasikan identitasnya, dengan menggandeng modernitas, dan kesalehan yang Islami.

Berangkat dari situ, maka penulis kemudian berinisiatif agar kajian pos-Islamisme juga dilihat dari aspek aspirasi pendidikan Islam pada kalangan anak muda, dan kelas menengah Muslim di Bulukumba. Pada umumnya juga menunjukkan tren yang kurang lebih sama yang melanda daerah perkotaan di Indonesia. Tetapi mereka tetap berada dalam bayang-bayang gerakan salafisme di Kabupaten Bulukumba. Terbukanya ruang publik, dan informasi yang begitu

mudah untuk diakses, dan peran pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasana yang mengikuti arus modernitas tidak bisa dibendung lagi. Implikasinya tentu berdampak pada surutnya mimpi-mimpi untuk menghidupkan Perda Syariat Islam, yang sejak awal memiliki nilai tawar untuk agenda politik keagamaan pemerintah di masa Patabai Pabokori periode 2000-2005, walaupun cenderung menjadi jualan politik oleh pemerintahan berikutnya, tetapi pada kenyataan juga menunjukkan miskin implementasi.

B. Saran

Penulis mengakui kajian ini memiliki keterbatasan, baik dari segi konsep maupun teoritis, sehingga perlu pengkajian yang lebih intensif lagi tentang pos-Islamisme yang perkembangannya dapat dilihat di daerah Bulukumba, serta relevansinya di bidang pendidikan Islam yang menjadi konsentrasi penulis saat ini. Baik secara konseptual, maupun teoritis hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk mendalami kajian pos-Islamisme yang belakangan ini menarik perhatian banyak peneliti utamanya perkembangannya di panggung politik tanah air. Terutama pada sikap akomodatif, dan moderat dari beberapa kelompok Islamis di Indonesia yang sebelumnya getol menyuarakan penegakan syariat Islam, dan ide khilafah Islamiyah sebagai solusi atas berbagai persoalan bangsa.

Kebutuhan pada penelitian selanjutnya, adalah memungkinkan untuk meninjau kembali agenda Islamisme di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah yang sejak era reformasi menjadi pusat pengumpulan narasi Islamisme. Dalam bentuk Perda Syariat Islam, sebagai komoditas politik untuk merebut perhatian

masyarakat di ranah lokal. Apakah daerah-daerah tersebut juga mengalami kondisi pos-Islamisme?. Ataukah narasi Perda syariat Islam tetap menjadi komoditas politik oleh sebagian elit lokal, dalam merebut suara masyarakat mayoritas Muslim.

Selain itu, peneliti juga menyarankan agar kajian pos-Islamisme dapat diteliti lebih lanjut pada kajian pendidikan Islam di Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang kini telah menjadi aspirasi masyarakat kelas menengah Muslim di Indonesia, terutama mengenai sistem pendidikannya, kurikulum, materi pembelajaran, tenaga pendidik, proses, dan luarannya.